

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan kawasan perumahan di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang layak. Namun, percepatan pembangunan tersebut tidak selalu diiringi dengan penyediaan infrastruktur pendukung yang memadai, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun ekologi, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan. Ketidaksiapan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan dalam pembangunan perumahan dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan permukiman serta melemahkan daya dukung lingkungan di sekitarnya (Fauzi, 2014).

Menurut Cahyadi dan Surtiari (2009), pembangunan perumahan di wilayah Jabodetabek, termasuk Kabupaten Bekasi sebagai daerah penyangga DKI Jakarta, masih menghadapi berbagai kendala dalam mewujudkan kawasan permukiman yang terintegrasi dan berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pembangunan fisik perumahan dan kesiapan infrastruktur pendukung, yang apabila tidak dikelola secara optimal dapat berdampak pada meningkatnya tekanan terhadap lingkungan serta menurunnya kualitas hidup masyarakat di kawasan permukiman. Pertumbuhan penduduk yang terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu mendorong semakin besarnya kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan hunian, sehingga memicu terjadinya alih fungsi lahan, terutama dari lahan pertanian menjadi kawasan permukiman.

Menurut Widiatmaka et al. (2015), kabupaten Bekasi menjadi salah satu wilayah yang mengalami alih fungsi lahan secara intensif karena berkembang sebagai kawasan industri yang mampu menarik arus penduduk pendatang dalam jumlah besar untuk bekerja dan menetap. Kondisi tersebut menyebabkan lahan pertanian yang sebelumnya berperan sebagai ruang terbuka dan daerah resapan air secara bertahap berubah menjadi kawasan terbangun yang didominasi oleh bangunan, jaringan jalan, dan infrastruktur pendukung lainnya. Perubahan penggunaan lahan ini berdampak pada menurunnya kemampuan tanah dalam

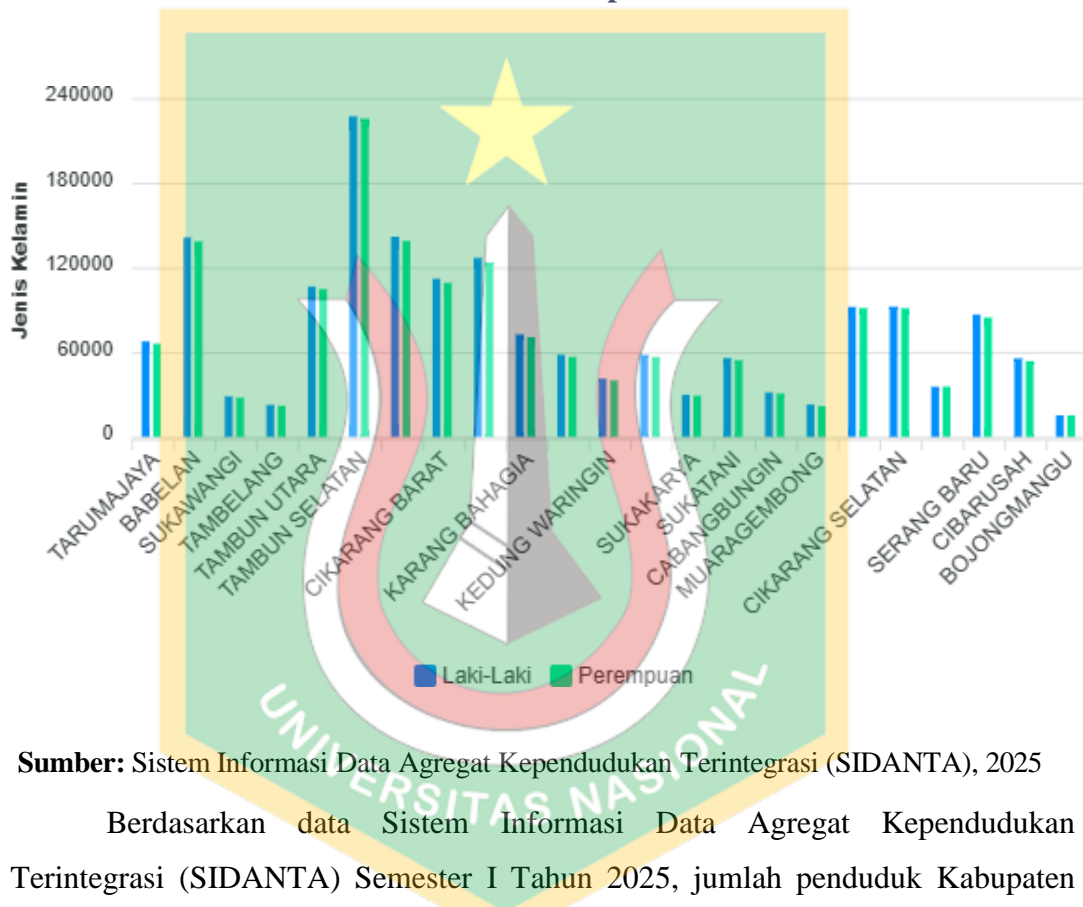
menyerap air hujan dan meningkatnya limpasan permukaan, sehingga sistem drainase lingkungan harus menampung volume air yang lebih besar dibandingkan dengan kondisi sebelumnya.

Menurut Desmawan et al. (2024), pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan industri di Kabupaten Bekasi menimbulkan tekanan terhadap daya dukung lingkungan, khususnya pada aspek tata air, yang berkontribusi pada meningkatnya risiko genangan dan banjir di kawasan permukiman apabila tidak diimbangi dengan perencanaan dan pengelolaan drainase yang memadai. Menurut Permono (2021), alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman merupakan proses yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang berasal dari kondisi internal pemilik lahan maupun dari tekanan eksternal lingkungan sekitarnya. Dari sisi internal, meningkatnya kebutuhan ekonomi rumah tangga, keterbatasan penguasaan lahan, serta rendahnya keuntungan sektor pertanian mendorong pemilik lahan untuk menjual atau mengalihkan fungsi lahan pertanian yang dimilikinya. Tekanan tersebut semakin kuat ketika pemilik lahan menghadapi tuntutan hidup yang terus meningkat seiring perubahan sosial dan ekonomi masyarakat. Faktor eksternal juga berperan signifikan dalam mempercepat terjadinya konversi lahan pertanian, seperti pengaruh sosial dari masyarakat sekitar yang telah lebih dahulu menjual lahannya, masuknya pengembang perumahan dengan penawaran harga yang relatif tinggi, serta pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkatkan kebutuhan ruang untuk permukiman dan aktivitas ekonomi. Selain itu, kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan dalam perubahan peruntukan lahan, baik secara langsung maupun tidak langsung, turut mendorong percepatan alih fungsi lahan.

Peningkatan taraf hidup masyarakat, keterbatasan lahan di kawasan perkotaan, serta pertumbuhan ekonomi dan jumlah rumah tangga menyebabkan lahan pertanian di wilayah sekitar kota menjadi sasaran utama konversi, sehingga secara bertahap mengurangi luas lahan pertanian produktif. Pertumbuhan penduduk yang cepat ini tidak terlepas dari posisi Kabupaten Bekasi sebagai bagian dari kawasan metropolitan Jabodetabek, yang menjadi pusat aktivitas ekonomi, industri, dan permukiman. Urbanisasi dan industrialisasi yang terus meningkat menyebabkan tekanan besar terhadap penggunaan lahan, terutama karena tingginya

kebutuhan akan kawasan permukiman baru untuk menampung penduduk yang datang dari luar daerah. Berikut data penduduk Kabupaten Bekasi pada Semester I Tahun 2025 yang bersumber dari Sistem Informasi Data Agregat Kependudukan Terintegrasi (SIDANTA). Data ini menggambarkan kondisi jumlah penduduk Kabupaten Bekasi berdasarkan jenis kelamin sebagai dasar dalam melihat perkembangan dan pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut.

**Gambar 1. 1 Data Penduduk Kabupaten Bekasi Tahun 2025**



**Sumber:** Sistem Informasi Data Agregat Kependudukan Terintegrasi (SIDANTA), 2025

Berdasarkan data Sistem Informasi Data Agregat Kependudukan Terintegrasi (SIDANTA) Semester I Tahun 2025, jumlah penduduk Kabupaten Bekasi mencapai 3.434.768 jiwa, yang terdiri atas 1.734.914 jiwa penduduk laki-laki dan 1.699.854 jiwa penduduk perempuan. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Bekasi merupakan salah satu wilayah dengan populasi terbesar di Provinsi Jawa Barat. Tingginya jumlah penduduk ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari proses pertumbuhan penduduk yang berlangsung secara terus-menerus dari tahun ke tahun. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bekasi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu pertumbuhan alami penduduk dan perpindahan penduduk dari daerah lain.

Kabupaten Bekasi memiliki posisi yang strategis karena berbatasan langsung dengan DKI Jakarta serta didukung oleh perkembangan kawasan industri, perdagangan, dan jasa. Kondisi ini menjadikan Kabupaten Bekasi sebagai daerah tujuan bagi masyarakat yang mencari peluang kerja maupun tempat tinggal dengan harga yang relatif lebih terjangkau dibandingkan wilayah inti perkotaan. Arus migrasi masuk tersebut berkontribusi besar terhadap peningkatan jumlah penduduk dan kepadatan wilayah. Meningkatnya jumlah penduduk membawa konsekuensi terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya kebutuhan akan hunian. Setiap penduduk membutuhkan tempat tinggal yang layak, aman, dan nyaman, sehingga pertumbuhan penduduk secara langsung berdampak pada meningkatnya permintaan terhadap rumah dan kawasan permukiman. Kebutuhan hunian tidak hanya meningkat secara kuantitas, tetapi juga menuntut ketersediaan lingkungan permukiman yang didukung oleh infrastruktur dasar, seperti jalan lingkungan, sistem drainase, jaringan air bersih, dan fasilitas umum lainnya. Tekanan terhadap kebutuhan hunian tersebut mendorong berkembangnya pembangunan perumahan di berbagai wilayah Kabupaten Bekasi. Kawasan yang sebelumnya didominasi oleh lahan pertanian, lahan terbuka hijau, dan ruang resapan air mulai mengalami perubahan fungsi menjadi kawasan permukiman. Pembangunan perumahan tidak hanya dilakukan oleh pengembang swasta, tetapi juga difasilitasi oleh pemerintah daerah melalui kebijakan perizinan dan penyediaan kawasan permukiman. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor utama yang mendorong masifnya pembangunan perumahan di Kabupaten Bekasi.

Di sisi lain, pembangunan kawasan perumahan yang berlangsung secara intensif menimbulkan berbagai tantangan pembangunan. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Berkurangnya lahan resapan air, meningkatnya permukaan kedap air, serta bertambahnya beban infrastruktur lingkungan berpotensi memunculkan permasalahan baru, seperti genangan dan banjir, apabila tidak diimbangi dengan perencanaan dan pengelolaan yang memadai. Oleh karena itu, pertumbuhan penduduk yang terus meningkat perlu diikuti dengan kebijakan pembangunan perumahan yang terencana, berkelanjutan, dan memperhatikan aspek lingkungan.

Kehidupan manusia pada dasarnya selalu berhubungan erat dengan lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Dalam aktivitas sehari-hari, manusia sangat bergantung pada kondisi lingkungan, mulai dari kebutuhan udara untuk bernapas, ketersediaan makanan dan minuman, hingga upaya menjaga kesehatan. Lingkungan yang bersih dan nyaman menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang kualitas hidup masyarakat, sehingga keberadaannya perlu dijaga dan dikelola secara optimal. Menurut Purnama et al. (2016), pengelolaan lingkungan yang tidak optimal, khususnya pada sistem drainase, dapat memicu berbagai permasalahan lingkungan yang berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.

Dalam upaya menciptakan lingkungan permukiman yang bersih, sehat, tertata, dan nyaman bagi masyarakat, serta meminimalkan terjadinya genangan air dan risiko banjir, pemerintah menetapkan berbagai kebijakan pembangunan. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terhadap lingkungan yang layak huni, salah satunya melalui penyediaan prasarana umum berupa sistem drainase sebagai bagian dari infrastruktur lingkungan. Kata drainase berasal dari istilah bahasa Inggris *drainage* yang bermakna proses mengalirkan, membuang, atau mengalihkan air dari suatu area.

Menurut Halim Hasmar dalam buku Adi Yusuf Muttaqin, drainase pada dasarnya merupakan suatu bidang ilmu yang membahas upaya teknis dalam mengendalikan kelebihan air pada suatu wilayah tertentu. Pengendalian tersebut mencakup air yang berasal dari curah hujan, rembesan, maupun sumber lainnya, dengan tujuan agar kondisi dan fungsi kawasan tetap dapat berjalan secara optimal tanpa mengalami gangguan. Drainase merupakan salah satu prasarana umum yang berperan dalam menyalurkan kelebihan air dari suatu wilayah ke lokasi lain sebagai tempat penampungan atau pembuangan air. Penyaluran air tersebut dapat diarahkan ke badan air alami maupun buatan, seperti sungai, laut, danau, sumur, serta berbagai fasilitas resapan air.

Drainase memegang peranan penting dalam kawasan permukiman yang memiliki kepadatan penduduk tinggi. Keberadaan sistem drainase yang berfungsi dengan baik dapat mengurangi berbagai permasalahan lingkungan, seperti potensi terjadinya banjir, tingginya muka air tanah, erosi tanah, serta kerusakan pada

infrastruktur jalan dan bangunan. Menurut Arafat (2008), sistem drainase yang efektif harus dirancang secara terpadu dan saling terhubung antarbagian, sehingga aliran air dapat dikendalikan dan dialirkan secara optimal sesuai dengan fungsi kawasan. Pada dasarnya, dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan drainase lingkungan yang terencana dan berkelanjutan guna mendukung pembangunan kawasan permukiman, Pengembangan drainase di Desa Jaya Mulya dilaksanakan dengan berpedoman pada landasan hukum yang jelas, antara lain PP No. 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Perbup No. 45 Tahun 2023 tentang Kewenangan, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Disperkimtan.

Peraturan tersebut memberikan pedoman terkait pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi dan berkelanjutan, termasuk upaya pengendalian banjir melalui sistem drainase yang efektif. Sementara Perbup No. 45 Tahun 2023 menegaskan peran dan tanggung jawab Dinas Perumahan dan Permukiman dalam perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur drainase di tingkat desa. Dengan adanya kedua regulasi ini, pengembangan drainase tidak hanya dilaksanakan secara teknis, tetapi juga sesuai dengan ketentuan hukum yang menjamin keberlanjutan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam pengelolaan lingkungan dan infrastruktur air, yang menegaskan bahwa sistem drainase merupakan bagian dari infrastruktur dasar lingkungan yang wajib disediakan dalam pengembangan kawasan permukiman. Selain itu, kebijakan tersebut juga diperkuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 30 Tahun 1995 tentang Kewajiban Penyediaan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum, dan Fasilitas Sosial, yang mewajibkan pengembang perumahan untuk menyediakan prasarana lingkungan, termasuk jaringan drainase, guna mencegah terjadinya genangan dan banjir di lingkungan masyarakat.

Drainase bertujuan untuk menciptakan lingkungan permukiman yang sehat melalui pengendalian limpasan air permukaan secara aman, lancar, dan efisien dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Menurut Damayanti et al. (2025), sistem drainase yang berfungsi dengan baik mampu mengurangi terjadinya genangan air yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya berbagai vektor penyakit, seperti nyamuk dan serangga lainnya, yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat, antara lain demam berdarah, disentri, dan penyakit berbasis

lingkungan lainnya. Selain itu, keberadaan drainase yang optimal juga berperan dalam melindungi dan memperpanjang umur ekonomis sarana fisik, seperti jalan, kawasan permukiman, dan area perdagangan, dari kerusakan serta gangguan aktivitas yang disebabkan oleh tidak optimalnya pengaliran air.

Perkembangan suatu wilayah umumnya diikuti oleh berkurangnya ketersediaan lahan terbuka yang berfungsi sebagai area resapan air alami (Tendean et al., 2017). Banyak permukaan tanah yang kemudian tertutup oleh material kedap air seperti beton dan aspal, sehingga kemampuan tanah untuk menyerap air menjadi semakin terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan volume air permukaan yang tidak tertampung, yang apabila tidak didukung oleh sistem pengaliran yang memadai dapat menimbulkan genangan air bahkan memicu terjadinya banjir di lingkungan permukiman.

**Gambar 1.2 Kondisi Banjir di Kabupaten Bekasi**



**Sumber:** Berita “Banjir Melanda 17 Kecamatan dan 40 Desa di Kabupaten Bekasi”,  
Pemkab Bekasi, 20 Februari 2021.

Peristiwa banjir yang melanda 17 kecamatan dan 40 desa di Kabupaten Bekasi tidak hanya dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi, tetapi juga berkaitan dengan pesatnya pembangunan kawasan permukiman dan perubahan tata guna lahan. Pembangunan perumahan dan kawasan terbangun yang tidak diimbangi dengan penyediaan prasarana drainase yang memadai menyebabkan berkurangnya daerah resapan air, sehingga limpasan air hujan tidak dapat dialirkan secara optimal. Kondisi ini memicu terjadinya genangan di lingkungan permukiman serta

meluapnya air ke jalan dan kawasan aktivitas masyarakat. Situasi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sistem drainase belum tentu menjamin berfungsinya pengendalian air permukaan secara efektif apabila tidak direncanakan, dibangun, dan dikelola secara optimal. Oleh sebab itu, evaluasi terhadap pengembangan drainase lingkungan menjadi penting untuk menilai sejauh mana sistem yang telah dibangun mampu menjawab permasalahan banjir yang terjadi di kawasan permukiman.

Menurut Pulungan et al. (2024), evaluasi diperlukan sebagai dasar untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan, perencanaan, dan kondisi implementasi di lapangan, sehingga pembangunan perumahan yang terus berlangsung tidak menimbulkan dampak lingkungan yang semakin besar. Kondisi banjir yang terjadi di berbagai wilayah Kabupaten Bekasi tersebut mencerminkan permasalahan pengelolaan drainase yang juga dirasakan pada skala lokal. Salah satu wilayah yang terdampak adalah Desa Jaya Mulya, yang mengalami genangan dan banjir terutama di kawasan permukiman. Kondisi di Desa Jaya Mulya menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut karena mencerminkan bagaimana kebijakan dan program pengembangan drainase diterapkan di tingkat lokal serta sejauh mana efektivitasnya dalam mengendalikan banjir di lingkungan permukiman.

**Gambar 1. 3 Kondisi Banjir di Perumahan Griya Mulya, Kabupaten Bekasi, Februari 2025**



Sumber: deraphukum.

Gambar di atas memperlihatkan kondisi banjir di kawasan Perumahan Griya Mulya, Desa Jaya Mulya, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Genangan air dengan ketinggian tertentu tampak merendam jalan dan rumah warga, sehingga

aktivitas masyarakat menjadi terganggu. Kepadatan bangunan di kawasan ini membuat air sulit terserap maupun dialirkan dengan baik, sehingga banjir bertahan cukup lama. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kelemahan pada sistem drainase dan pengendalian tata ruang di Perumahan Griya Mulya. Situasi ini sekaligus menjadi bukti bahwa wilayah permukiman padat seperti Griya Mulya sangat rentan terhadap bencana banjir, baik dari sisi kerugian material maupun dampak sosial yang ditimbulkan bagi masyarakat sekitar.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi, Dodi Supriadi, menyatakan bahwa pihaknya telah menerjunkan personel untuk membantu warga terdampak. Ia menjelaskan, *“Akibat curah hujan tinggi, drainase yang tidak memadai, dan luapan kali buatan, air merendam permukiman warga serta menghambat akses jalan”* (BPBD Kabupaten Bekasi, 2025). Pernyataan ini menunjukkan bahwa persoalan banjir bukan hanya faktor alam, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola drainase dan infrastruktur di kawasan perumahan. Sistem evaluasi pengembangan drainase ini menjadi jembatan antara kebutuhan warga dan kebijakan pembangunan infrastruktur air yang ramah lingkungan. Dengan memfasilitasi pelaporan titik genangan dan kerusakan saluran secara cepat, proses perbaikan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan ekosistem perkotaan. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya strategis Pemerintah untuk memastikan bahwa setiap jengkel pembangunan drainase memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang dalam bingkai pembangunan berkelanjutan.

Menurut Binawan dan Soetopo (2022), Pembangunan berkelanjutan merupakan langkah strategis yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terukur. Tujuannya adalah untuk menjaga kelestarian ekosistem serta memastikan bahwa kualitas hidup dan kesejahteraan yang dinikmati masyarakat saat ini dapat terus dirasakan oleh generasi mendatang. Dalam konteks Kabupaten Bekasi, pengembangan sistem drainase pada kawasan perumahan pada prinsipnya ditujukan untuk mendukung kelancaran aliran air, mencegah terjadinya genangan, serta menjaga kualitas lingkungan permukiman. Sistem drainase seharusnya direncanakan dan dikembangkan secara terintegrasi dengan pembangunan perumahan agar mampu mengakomodasi perubahan tata guna lahan

dan peningkatan limpasan air hujan akibat aktivitas pembangunan. Dengan demikian, keberadaan drainase tidak hanya berfungsi sebagai saluran pembuangan air, tetapi juga menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan lingkungan permukiman yang aman dan berkelanjutan. Idealnya, pengembangan perumahan di Desa Jaya Mulya dilengkapi dengan sistem drainase yang memadai dan dikelola secara berkelanjutan sehingga mampu meminimalkan risiko banjir dan genangan air. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pengembangan sistem drainase belum sepenuhnya direncanakan dan dievaluasi secara optimal. Terjadinya banjir di Perumahan Griya Mulya menjadi indikasi bahwa sistem drainase yang ada belum mampu mengalirkan air hujan secara efektif. Kondisi ini menunjukkan adanya permasalahan dalam evaluasi pengembangan drainase yang dapat dilihat dari berbagai aspek, sehingga menimbulkan kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan realitas yang terjadi di lapangan.

*Pertama*, kabupaten Bekasi sebagai wilayah penyangga DKI Jakarta mengalami perkembangan kawasan permukiman yang cukup pesat. Perkembangan tersebut menuntut tersedianya infrastruktur lingkungan yang memadai, salah satunya adalah sistem drainase lingkungan yang berfungsi untuk mengalirkan dan mengendalikan limpasan air hujan. Sistem drainase yang baik menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan hidrologi kawasan permukiman serta mencegah terjadinya genangan maupun banjir di lingkungan perumahan. Menurut Nurhapni dan Burhanudin (2011), pembangunan sistem drainase di kawasan perumahan perlu dirancang dengan memperhatikan prinsip berwawasan lingkungan agar mampu mengendalikan aliran air hujan sekaligus meminimalkan dampak perubahan tata guna lahan terhadap kondisi lingkungan. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan dan pengelolaan drainase lingkungan menjadi aspek penting yang harus diperhatikan dalam pembangunan kawasan perumahan agar kondisi lingkungan tetap terjaga dan berkelanjutan.

*Kedua*, Seiring dengan berkembangnya kawasan perumahan di Desa Jaya Mulya, permasalahan yang berkaitan dengan sistem drainase lingkungan mulai muncul, terutama pada saat intensitas hujan tinggi. Kondisi tersebut terlihat dari terjadinya genangan air yang tidak hanya berada di sekitar saluran drainase, tetapi juga meluas ke area permukiman dan jalan lingkungan sehingga mengganggu aktivitas masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem drainase lingkungan

yang ada belum mampu berfungsi secara optimal dalam mengalirkan serta mengendalikan limpasan air hujan di kawasan tersebut. Fenomena ini terlihat dari peristiwa banjir yang merendam sejumlah rumah di Perumahan Griya Mulya Indah (GMI) di Desa Jaya Mulya setelah hujan dengan intensitas tinggi dan luapan air dari sungai. Peristiwa tersebut diduga berkaitan dengan kurang tepatnya penilaian serta zonasi lahan dalam perencanaan kawasan, sehingga air masuk ke area permukiman dan menimbulkan genangan yang cukup tinggi. Warga juga mengeluhkan kurangnya perhatian dari pihak developer terhadap kondisi banjir yang terjadi di kawasan tersebut, yang turut menambah tekanan lingkungan dan sosial di dalam perumahan (Deraphukum, 2025).

*Ketiga*, pengembangan drainase lingkungan di kawasan perumahan Desa Jaya Mulya masih menunjukkan berbagai keterbatasan, baik dari segi perencanaan, kapasitas saluran, maupun pengelolaan dan pemeliharannya. Drainase cenderung dipandang sebagai pelengkap pembangunan fisik perumahan, sehingga pengembangannya belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi lingkungan serta peningkatan kebutuhan akibat bertambahnya jumlah penduduk. Akibatnya, sistem drainase yang ada belum mampu mendukung prinsip pembangunan perumahan berkelanjutan dan berpotensi menurunkan kualitas lingkungan permukiman. Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan pembangunan perumahan dan kondisi drainase lingkungan yang ada di lapangan. Berdasarkan hasil observasi langsung yang dilakukan penulis, masih ditemukan saluran drainase yang mengalami pendangkalan, penyempitan, serta kurangnya pemeliharaan rutin sehingga aliran air tidak berjalan secara optimal, terutama saat curah hujan meningkat.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Pengembangan Drainase Lingkungan dalam Pembangunan Perumahan Berkelanjutan di Desa Jaya Mulya, Kabupaten Bekasi.”** Pemilihan judul ini didasarkan pada adanya indikasi ketidaksesuaian antara pesatnya pembangunan perumahan dan kesiapan sistem drainase lingkungan yang dikembangkan. Dalam praktiknya,

pengembangan drainase sering kali hanya diposisikan sebagai pelengkap pembangunan fisik perumahan, sehingga aspek perencanaan, kapasitas, dan keberlanjutan sistem drainase belum menjadi perhatian utama.

Penelitian ini penting dilakukan karena sistem drainase lingkungan memiliki peran strategis dalam menjaga daya dukung lingkungan kawasan permukiman. Ketidakefektifan pengembangan drainase tidak hanya berdampak pada munculnya banjir dan genangan, tetapi juga mencerminkan lemahnya integrasi antara kebijakan pembangunan perumahan dan pengelolaan lingkungan. Tanpa adanya evaluasi yang komprehensif, permasalahan drainase berpotensi terus berulang dan menimbulkan dampak lingkungan jangka panjang yang bertentangan dengan prinsip pembangunan perumahan berkelanjutan. Selain itu, Desa Jaya Mulya sebagai wilayah yang mengalami perkembangan perumahan cukup pesat menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pembangunan perumahan dan kondisi drainase lingkungan di lapangan. Minimnya kajian ilmiah yang secara khusus mengevaluasi pengembangan sistem drainase lingkungan di kawasan perumahan Desa Jaya Mulya menjadikan penelitian ini relevan dan penting untuk dilakukan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya menggambarkan kondisi drainase lingkungan yang ada, tetapi juga mampu memberikan dasar evaluatif dan rekomendasi perbaikan bagi pemerintah daerah dan pihak terkait dalam merumuskan kebijakan serta strategi pengembangan drainase lingkungan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut. Maka penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu: bagaimana pengembangan sistem drainase lingkungan dalam mendukung pembangunan perumahan berkelanjutan di Desa Jaya Mulya, Kabupaten Bekasi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengembangan sistem drainase lingkungan dalam mendukung pembangunan perumahan berkelanjutan di Desa Jaya Mulya,

Kabupaten Bekasi. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana sistem drainase lingkungan yang dikembangkan telah berfungsi secara efektif dalam mengendalikan limpasan air, mencegah terjadinya banjir dan genangan, serta menjaga kualitas lingkungan permukiman.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian pada manfaat dari penelitian ini adalah:

##### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kajian Administrasi Publik, khususnya dalam aspek evaluasi kebijakan pembangunan perumahan dan pengelolaan infrastruktur lingkungan oleh pemerintah daerah. Melalui pendekatan evaluatif, penelitian ini memberikan gambaran mengenai keterkaitan antara kebijakan pembangunan perumahan dan pengembangan sistem drainase lingkungan dalam mendukung pembangunan perumahan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas efektivitas peran pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi infrastruktur lingkungan sebagai bagian dari pelayanan publik.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam menilai kinerja pengembangan sistem drainase lingkungan di kawasan perumahan. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan drainase lingkungan agar lebih efektif dalam mencegah banjir dan genangan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan perumahan yang lebih terintegrasi dengan pengelolaan lingkungan dan berorientasi pada keberlanjutan.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memudahkan pembaca memahami alur penelitian dari latar belakang masalah hingga metode penelitian yang digunakan. Penulisan skripsi ini dibagi menjadi tiga bab yang saling terkait.

**BAB I****PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bagian awal skripsi yang menyajikan gambaran umum mengenai topik penelitian sebagai dasar pemahaman pembaca terhadap konteks penelitian secara menyeluruh. Dalam bab ini dijelaskan latar belakang penelitian yang menguraikan alasan pentingnya permasalahan yang diteliti, identifikasi masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan yang ingin dicapai, serta manfaat penelitian baik secara akademis maupun praktis.

**BAB II****TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat kajian teori yang relevan dengan topik penelitian, hasil penelitian terdahulu, serta konsep-konsep utama yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis. Tinjauan pustaka berfungsi untuk menunjukkan posisi penelitian ini di antara penelitian sebelumnya, sekaligus membangun kerangka pemikiran yang digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian. Dengan demikian, bab ini menjadi landasan akademis dalam menelaah dan menginterpretasikan data penelitian.

**BAB III****METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, lokasi dan waktu penelitian, serta informan penelitian. Selain itu, bab ini menguraikan teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, metode analisis data, serta langkah-langkah yang dilakukan untuk menjamin keabsahan dan keandalan data. Melalui bab ini, penelitian disajikan sebagai suatu proses ilmiah yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

**BAB IV****HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari proses pengumpulan data di lapangan terkait pengembangan

sistem drainase lingkungan di kawasan perumahan Desa Jaya Mulya, Kabupaten Bekasi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir skripsi yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, serta menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Selanjutnya, saran disampaikan sebagai bentuk rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah daerah dan pihak terkait dalam upaya perbaikan pengembangan sistem drainase lingkungan di kawasan perumahan

